

Evaluasi Program Kota Layak Anak Di Kabupaten Indragiri Hulu

* **Ahmad Deni¹, Dita Fisdian Adni²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : ahmaddenistudent@uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu sudah banyak mendapatkan penghargaan tetapi kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu masih terus meningkat setiap tahunnya dan kurang tanggapnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani kasus pelanggaran hak-hak anak sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran hak anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi mencakup efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya distribusi anggaran yang tepat, penyusunan peta kebutuhan, dapat menjangkau masyarakat yang berada di pelosok, melibatkan seluruh masyarakat, dan memperluas cakupan penerima program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Kunci: Evaluasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Layak Anak

Abstract

This study aims to evaluate the Child-Friendly City Program in Indragiri Hulu Regency and to determine the factors that inhibit the implementation of the Child-Friendly City program in Indragiri Hulu Regency. The main problem found is that the Child-Friendly City/Regency program in Indragiri Hulu Regency has received many awards, but cases of child rights violations that occur in Indragiri Hulu Regency continue to increase every year and the lack of responsiveness of the Women's Empowerment and Child Protection Service of Indragiri Hulu Regency in handling cases of child rights violations so that there are still many child rights violations in Indragiri Hulu Regency. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations and documentation. The results of the study show that the evaluation includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. This study recommends the need for proper budget distribution, preparation of needs maps, being able to reach people in remote areas, involving the entire community, and expanding the scope of recipients of the Child-Friendly City (KLA) program in Indragiri Hulu Regency.

Keywords : Evaluation, Women's Empowerment and Child Protection Service, Child-Friendly City

PENDAHULUAN

Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau system pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dalam pengelolaan badan pemerintahan serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah (Labolo, 2017:17).

Menurut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang KLA Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak inti dari KLA adalah terciptanya kabupaten/kota, dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Sebelum adanya KLA ini tentunya tidak ada Undang-Undang khusus tentang perlindungan anak. Kabupaten/Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari kebijakannya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Indonesia mempunyai angka kekerasan terhadap anak yang masih tergolong tinggi. Survei nasional yang dilakukan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada tahun 2018 terdapat 62% anak perempuan dan anak laki-laki yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan selama mereka hidup. Dari survei tersebut menyebutkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual dan separuhnya dari semua anak laki-laki mengalami kekerasan emosional.

Demi mencapai suatu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu menjamin kesejahteraan umum terkhusus dalam perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia perlu adanya kebijakan untuk menyatukan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan anak. Maka menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang berguna untuk memenuhi yang berkaitan dengan anak termasuk hak anak melalui perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menurut Nasdian (dalam Silap C, Kasenda V, and Kumayas N 2019) pemberdayaan merupakan secara konseptualnya membahas terkait suatu individu, kelompok, ataupun suatu komunitas berupaya untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan

mengupayakan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan.

METODE

Menurut Sugiyono (2020:2) “Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan peneliti ini. Menurut Sugiyono (2018:1) metode penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat diperuntukan untuk mengamati suatu kondisi pada suatu objek sebenarnya.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang studi kasusnya mengarah kepada pendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut William Dunn terdapat 6 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya sebuah kinerja yaitu :

1) Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu hal yang menunjukkan keberhasilan dari segi tujuan yang telah ditetapkan apakah sudah tercapai atau tidaknya hasil yang diharapkan. Jika hasil mendekati tujuan berarti semakin tinggi efektivitas suatu Program Kota Layak (KLA) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya berdasarkan Indikator Efektivitas dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu terkait tujuan ditetapkan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sudah menjalankan tujuan ditetapkan tetapi belum sepenuhnya tercapai. Kemudian dari hasil yang diharapkan yaitu terwujudnya sistem pembangunan yang menjamin seluruh pemenuhan hak anak dan perlindungan anak serta pemerintah memberikan perhatian dan kerja nyata secara menyeluruh sampai ke daerah terpelosok.

2) Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dengan sebaik-baiknya dengan kata lain dilakukan secara optimal tanpa membuang sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi ini dilakukan agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dilakukan secara efektif dan produktif untuk mencapai hasil yang diinginkan pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya berdasarkan Indikator Efisiensi dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Layak Anak Kabupaten Indragiri Hulu terkait Bentuk Tindakan yaitu yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dan yang dirasakan masyarakat sangat positif untuk mendukung Program Kota Layak Kabupaten Indragiri Hulu tetapi masih perlu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara merata dan menyentuh ke bagian terpelosok. Kemudian terkait Sumber Alokasi Dana yaitu alokasi dana utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu, didukung oleh lintas OPD lainnya, bantuan pemerintah dan kemnetrian. Ketua Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu dan Kecamatan Rengat Barat menilai alokasi dana masih terbatas dan belum rutin diberikan setiap tahunnya. Dan masyarakat tidak mengetahui

informasi detail alokasi dana tetapi masyarakat berharap dana tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran.

3) Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu bagian penting dalam indikator pada evaluasi kebijakan pada Program Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan indikator kecukupan ini akan membantu pemerintah untuk mengetahui seberapa jauh program yang telah dilaksanakan dapat memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Selanjutnya berdasarkan Indikator Kecukupan dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Layak Anak Kabupaten Indragiri Hulu terkait Pencapaian Hasil sudah mengalami perubahan positif tetapi pencapaian hasil belum maksimal untuk dapat menyelesaikan masalah dan masih perlu diperbaiki secara berkala. Kemudian terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dari segi kompetensi cukup memadai tetapi dari segi jumlah tidak memadai dan terbatas yang masih mengandalkan mitra sehingga tidak tersampaikan secara menyeluruh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu membutuhkan tenaga teknis pelayanan korban dan pendekatan ramah anak serta melakukan pelatihan khusus.

4) Pemerataan

Pemerataan ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam memastikan bahwa manfaat dari suatu program dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat terkhususnya perihal Perlindungan Anak di Kabupaten Indragiri Hulu tanpa adanya kesenjangan dan ketimpangan. Pemerataan ini dibuat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi anak-anak serta masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya berdasarkan Indikator Pemerataan dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Layak Anak Kabupaten Indragiri Hulu terkait Sejauhmana Pemerataan belum sepenuhnya terjadi dan masih dalam tahap proses. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sudah memberikan solusi tetapi masyarakat menilai pemerataan di desa-desa belum mendapatkan perhatian yang setara dengan di pusat kota. Kemudian terkait Proses Pelaksanaan dinas terkait sudah sesuai dengan standar prosedur nasional tetapi para ketua forum anak proses pelaksanaan masih kurang terencana dan belum optimal melibatkan anak. Serta orang tua atau wali dan masyarakat berharap dinas terkait melaksanakan kerja nyata dan transparan dalam proses pelaksanaan.

5) Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam merespons seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cara menyesuaikan program dengan perubahan serta tuntutan yang ada. Sehingga keinginan, harapan dan tuntutan dari masyarakat dapat dilayani dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan Indikator Responsivitas dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Layak Anak Kabupaten Indragiri Hulu terkait Peran Aktif Pemerintah belum sepenuhnya karena keterjangkauan di daerah terpencil tetapi pemerintah telah melakukan sosialisasi. Para ketua forum anak, orang tua atau wali dan masyarakat menilai sosialisasi yang dilakukan cakupan dan frekuensi masih pada moment tertentu, belum sampai ke desa-desa dan belum rutin serta sampai belum sampai ke seluruh masyarakat. Kemudian terkait Program Edukasi belum rutin, masih dibatasi dan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat.

6) Ketepatan

Ketepatan merupakan sejauh mana penerima mendapatkan manfaat dari Program Kota Layak Anak di Kabupaten Indragiri Hulu yang tepat sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat dikatakan tepat atau efektif apabila program mencapai sasaran yang telah ditentukan atau tidak menyimpang.

Selanjutnya berdasarkan Indikator Ketepatan dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Layak Anak Kabupaten Indragiri Hulu terkait Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sudah tepat sasaran dan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat masih sebagian yang tepat sasaran. Kemudian terkait Manfaat Program Kota Layak Anak Kabupaten Indragiri Hulu yang diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu kepada masyarakat sudah sangat baik dan positif tetapi masih perlu peningkatan, kesesuaian implementasi dilapangan, penguatan dan pengembangan segala aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Labolo, M. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Depok : Pt Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- Silap C, Kasenda V, and Kumayas N. 2019. "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3 (3): 4.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung:: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:: CV Alfabeta.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*,. Jakarta.: Pt. Buku Kita:.